

Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (*Pendekatan LQ dan Shift Share*):

Kajian Isu Strategis Pembangunan Nasional Transformasi Ekonomi:
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa dan Bali

Haryanto¹

¹ Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas RI

Korespondensi: haryanto@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i2.101> | halaman: 178-200

Dikirim: 01-08-2021 | Diterima: 01-09-2021 | Dipublikasikan: 20-09-2021

Abstrak

This study is aimed to: (a) analyze changes in the economic structure of Java and Bali from 2010 to 2019, (b), understand to what extent the level of specialization of economic sectors in the Java and Bali Region that utilizes the base or the leading sector, and (c) understand on economic sectors that are growing progressively and have high competitiveness in the Java and Bali Regions. This study uses the LQ method and shift share analysis. Results show that the economy of Java-Bali from 2010 to 2019 did not experience much shift in the economic structure. In general, sectors that became the source of growth in 2010 in each province in Java-Bali remained the base sector/sources of growth in 2019. The shift share analysis shows that the Manufacturing sector in most provinces in Java-Bali is in quadrant III, which means that it grows slowly and its commodities lack of competitiveness. Meanwhile, the Communication and Information sector is mostly in quadrant II, which means this sector is growing progressively but lacks of competitiveness. Likewise with the Transportation and Warehousing sector, in most provinces this sector is able to grow progressively, but this sector lacks good competitiveness (quadrant II). On the other hand, the Service sectors in most provinces have grown progressively and have good competitiveness (quadrant I). The implication of this finding is the presence of symptoms of premature deindustrialization in Java-Bali, since the Services sector is growing faster, more progressive with a contribution to GDRP exceeds the Manufacturing sector, whereas the Manufacturing sector is not mature yet. Premature deindustrialization in Java-Bali has the potential to reduce job creation in the manufacturing sector and increase the risk of unemployment. Although the Service sector is growing progressively and competitively; However, if we look at the labor productivity, it appears that the labor productivity of the Service sector is much smaller than the labor productivity of the Manufacturing sector.

Kata kunci: transformasi struktur ekonomi, LQ, shift share, kebijakan pembangunan ekonomi

Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share)

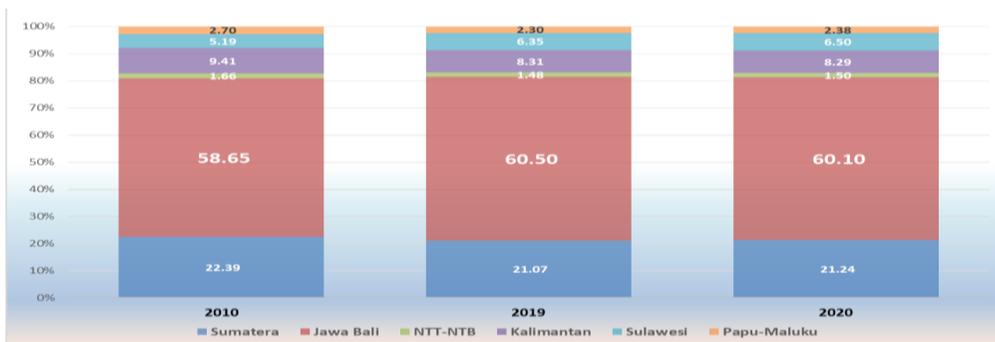
Kajian Isu Strategis Pembangunan Nasional Transformasi Ekonomi: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa dan Bali

Haryanto

I. Pendahuluan

Ekonomi Jawa dan Bali berperan sangat besar dalam perekonomian nasional. Tahun 2020 Jawa dan Bali menyumbang 60,1% dari total PDB Nasional yang sebesar Rp. 10.722,4 Trilyun. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa perekonomian Jawa dan Bali menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, bila dilihat dari sisi luas wilayah, Jawa-Bali hanya sebesar 7,04% dari total wilayah Indonesia yang seluas 1.916.908 km². Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,07% sebagai akibat pandemik Covid-19 tidak terlepas dari kontribusi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Wilayah Jawa sebesar -2,51% dan Wilayah Bali Nusa Tenggara sebesar -5,01%. Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi makanan minuman akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemik. Sementara, kontraksi pertumbuhan di Pulau Bali – Nusra disebabkan oleh kontraksi yang dalam di Provinsi Bali (-9,3 persen, yoy) seiring dengan tekanan yang besar di sektor pariwisata sebagai dampak pembatasan mobilitas akibat pandemik.

Dominasi perekonomian di wilayah Jawa Bali dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Seperti terlihat dalam Gambar 1 berikut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 distribusi share PDRB Jawa-Bali sebesar 58,65% tahun 2010 dan terus meningkat menjadi 60,50% tahun 2019, serta 60,10% tahun 2020.



Gambar 1. Distribusi PDB berdasarkan pulau

Sumber: Diolah dari BPS

Disisi lain, pemerintah melalui berbagai kebijakan bertekad untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur perekonomian, serta mempercepat transformasi ekonomi agar misi Indonesia menuju negara maju tahun 2045 dapat diwujudkan. Transformasi ekonomi menuju negara maju berpendapatan tinggi perlu ditopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar Indonesia dapat terlepas dari *middle income trap*. Di tengah pandemi Covid-19, pada tanggal Juli 2020, Bank

Dunia menaikkan status Indonesia dari *lower middle income country* menjadi *upper middle income country* dengan pendapatan per kapita sebesar 4.050 dollar AS (2019). Namun, pada awal Juli 2021, Bank Dunia kembali merilis laporannya bahwa status Indonesia kembali turun menjadi *middle income country* sebagai dampak yang tak terhindarkan dari pandemi Covid 19. Hal ini tentu akan menjadi beban yang semakin berat bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi yang merupakan prakondisi penting untuk membawa Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi ditengah situasi pandemik saat ini perlu terus diupayakan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang perlu terus diperkuat. Struktur ekspor saat ini didominasi oleh komoditas primer dan produk berbasis sumber daya alam (SDA), sehingga rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Sebagian besar bahan baku dalam kegiatan produksi domestik, termasuk untuk ekspor, juga masih bergantung pada impor. Kondisi ini memberikan tantangan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan impor sehingga berdampak pada peningkatan defisit transaksi berjalan. Perkembangan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan struktur neraca barang dan neraca jasa, baik dari sisi ekspor maupun sisi impor, agar ekonomi dapat tumbuh berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu strategi utama transformasi ekonomi diarahkan untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam (SDA) ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.

Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan industry domestik untuk meningkatkan nilai tambah industri melalui hilirisasi produk SDA. Upaya hilirisasi tidak hanya mendukung penguatan struktur ekonomi, tapi juga mendukung integrasi antarsektor dan antarwilayah. Melalui hilirisasi, kawasan luar Jawa dapat memasok bahan baku bagi industri di Jawa yang saat ini bergantung pada impor sehingga mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan. Namun, sejauhmana kondisi perekonomian Indonesia (khususnya Wilayah Jawa dan Bali) selama ini dalam menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam (SDA) ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Sudahkan sektor industry manufaktur dan jasa memiliki daya saing dan tumbuh secara progresif? Naskah kebijakan ini mencoba menjawab berbagai permasalahan tersebut, dan melakukan analisis secara kuantitatif melalui pendekatan *Shift Share* dan *Location Quotient* (LQ) untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomin Wilayah Jawa dan Bali (dalam hal daya saing dan kinerja pertumbuhan), dan untuk melihat sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Hal ini penting dilakukan untuk melihat kesiapan Jawa dan Bali dalam mentransformasikan struktur ekonominya dan merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dapat mendukung proses transformasi ekonomi nasional berjalan secara baik dan berkualitas.

II. Tujuan

Tujuan dari penulisan naskah kebijakan ini adalah:

1. Melakukan analisis perubahan struktur ekonomi Jawa dan Bali sejak 2010 hingga 2019
2. Melakukan kajian mengenai sektor-sektor ekonomi yang tumbuh secara progresif dan mempunyai daya saing yang tinggi di Wilayah Jawa dan Bali
3. Melakukan kajian sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sector*

4. Menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka kebijakan transformasi struktur ekonomi khususnya Wilayah Jawa dan Bali

III. Identifikasi Permasalahan

Wilayah Jawa-Bali menjadi barometer perekonomian Indonesia. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Begitu halnya dengan keberhasilan implementasi strategi transformasi ekonomi yang diarahkan untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam (SDA) ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, juga akan tergantung kepada keberhasilan dalam melakukan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali. Apakah selama ini kebijakan-kebijakan ekonomi telah diarahkan untuk memperkuat fondasi utama pada sektor industri manufaktur dan Jasa? Sejauhmana kinerja sektor-sektor penting yang diharapkan akan mampu menjadi pemicu utama dalam melakukan transformasi ekonomi? Apa kebijakan yang semestinya dilakukan yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan transformasi ekonomi untuk Wilayah Jawa dan Bali?

IV. Kegunaan

Dengan diketahuinya kinerja atau produktivitas kerja perekonomin Wilayah Jawa dan Bali terkait kemampuan daya saing dan progresifitas pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, maka dapat diketahui sejauhmana kesiapan Jawa dan Bali dalam melaksanakan kebijakan transformasi ekonominya. Dengan demikian, dapat dirumuskan usulan berbagai alternatif kebijakan untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses transformasi ekonomi Jawa- Bali dan ekonomi nasional secara umum.

V. Metodologi Kajian

Untuk menganalisis permasalahan dalam nasakah kebijakan ini akan digunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data: PDRB (PDRB ADHK 2010) dari 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali pada tahun 2010 dan 2019. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sector* selama periode pengamatan akan digunakan metode *Location Quotient* (LQ); sedangkan, untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang tumbuh secara progresif dan mempunyai daya saing yang tinggi di Wilayah Jawa dan Bali akan digunakan analisis shift share. Dengan diketahuinya kinerja sektoral dalam kurun waktu 2010 -2019 maka diharapkan akan dapat dirumuskan alterantif kebijakan yang relevan untuk mendukung kebijakan tranfromasi ekononomi di Wilayah Jawa-Bali.

VI. Studi Literatur

Economic base theory menyatakan bahwa faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah atau besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Asyard, 1999). Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua yakni kegiatan basis dan kegiatan non-basis,

namun hanya kegiatan basis saja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Glasson (1977) menyatakan bahwa semakin banyaknya sektor basis dalam suatu wilayah maka akan menambah pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang ada di dalam wilayah tersebut dan juga akan menimbulkan kenaikan volume sektor non basis. Sektor basis merupakan penggerak utama dalam perekonomian suatu wilayah karena sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar dan sektor non-basis berhubungan secara tidak langsung dan melalui sektor basis terlebih dahulu. Analisis *Location Quotient (LQ)* dapat digunakan untuk mengetahui mana sektro basis dan non basisi dari speroekonomian suatau wilayah. Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dengan membandingkan secara relatif dengan sektor lainnya dapat digunakan analisis shift share (Soepono, 1993).

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *location quotient (LQ)* merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor *i* di kota atau kabupaten dan share out sektor *i* di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Menurut Hood (1998), menyatakan bahwa *location quotient* adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relative kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sector unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi industri. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan Pendekatan Nilai Tambah/ Pendapatan (PDRB), sebagai berikut:

$$LQ = \left[\frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \right]$$

Dimana :

X_{ir} = sektor *i* di daerah (Provinsi)

X_r = jumlah seluruh sektor di daerah (Provinsi)

X_{in} = sektor *i* di wilayah yang lebih luas (misal se Jawa-Bali)

X_n = jumlah seluruh sektor di wilayah yang lebih luas (misal se Jawa-Bali)

Jika hasil perhitungan dari formulasi di atas menghasilkan:

- a. $LQ > 1$ artinya, komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
- b. $LQ = 1$ komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- c. $LQ < 1$ komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain:

- a. LQ merupakan suatu alat analisis yang digunakan dengan mudah dan sederhana, serta cepat penggunaannya.
- b. LQ dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya.
- c. Perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.
- d. Penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit.

Dari segi keterbatasannya, metode LQ terbatas dalam:

- a. Karena kesederhanaan pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid.
- b. Pengumpulan data yang sangat valid sangat sulit dilakukan di lapangan sehingga mempersulit pengumpulan data.
- c. Deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga.
- d. Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

2. Analisis Shift Share

Perubahan struktur perekonomian dapat terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sebuah sektor ekonomi bisa menjadi kurang penting peranannya dalam pembentukan PDB/ PDRB digeser oleh sektor lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Fenomena transformasi ekonomi ini bisa berbeda antar Provinsi yang selanjutnya bisa mengubah posisi suatu Provinsi di dalam perekonomian nasional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan seperti penyediaan bahan baku, teknologi, investasi, dan sumber daya manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut maka diketahui transformasi ekonomi di suatu wilayah adalah penting terutama untuk pedoman dalam mengalokasikan dana pembangunan yang terbatas, sumberdaya manusia, teknologi dan input-input penting untuk produksi antar Provinsi. Dalam hal ini analisis yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur ekonomi adalah analisis *shift-*

share. Analisis *shift share* membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah dengan wilayah nasional (Tarigan, 2005). Analisis *shift-share* mempunyai beberapa kegunaan yaitu: (1) mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (2). mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan suatu sektor. (4). mengetahui komponen yang mempengaruhi kesempatan kerja nyata. (5). mengetahui pergeseran ekonomi regional sebagai akibat perubahan ekonomi nasional maupun ekonomi regional itu sendiri.

Pendekatan *shift share* ini pertama kali diperkenalkan oleh Dunn tahun 1960 untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor secara nasional, regional dan lokal (Goschim, 2014). Pendekatan ini juga digunakan oleh Perloff et al. (1960) untuk studi yang berkaitan dengan data ketenaga-kerjaan. Teknik ini banyak digunakan dalam menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya pertumbuhan lapangan kerja, diterapkan untuk menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas (Rice dan Horton, 2010).

Menurut metode ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yakni pertumbuhan nasional (Komponen Pertumbuhan Nasional/KPN), pertumbuhan sektoral atau bauran industri (Komponen Pertumbuhan Proporsional/KPP), dan pertumbuhan daya saing (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah/KPPW). Sementara itu, *Shift Share* (SSA) merupakan penjumlahan dari Komponen Pertumbuhan Nasional, Komponen Pertumbuhan Proporsional dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah. Metode penghitungan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. **Komponen Pertumbuhan Jawa-Bali (KPJB).**

Komponen pertumbuhan Jawa-Bali merupakan pertambahan pendapatan atau tingkat produksi suatu daerah (Provinsi) agar bisa tumbuh paling tidak sama dengan laju pertumbuhan daerah acuan (Jawa-Bali) dalam suatu periode tertentu. KPJB berfungsi untuk melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di wilayah yang menaunginya. Dalam Kajian ini nilai KPJB menggunakan total nilai PDRB dari 7 provinsi di Jawa dan Bali (sesuai cakupan penelitian). Penghitungan KPJB menggunakan formula sebagai berikut:

$$KPJB = \left[\frac{X_{t1}}{X_{t0}} - 1 \right]$$

Dimana:

KPJB = Komponen Pertumbuhan 7 Provinsi di Jawa dan Bali

X_{t1} = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa dan Bali pada periode akhir (2019)

X_{t0} = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa dan Bali pada periode awal (2010)

b. **Komponen Pertumbuhan Proporsional/KPP**

KPP merupakan alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan produksi nasional (dalam hal ini Jawa-Bali) karena tingginya konsentrasi industri (sektor) regional. KPP atau bisa disebut sebagai *proportionally shift* ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan permintaan akhir,

ketersediaan bahan baku, dan kebijakan sektoral. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan ketersediaan bahan mentah, perbedaan kebijakan industri dan perbedaan struktur, dan keragaman pasar. Penghitungan KPP menggunakan formula sebagai berikut:

$$KPP = \left[\frac{X_{j(t1)}}{X_{j(t0)}} - \frac{X_{t1}}{X_{t0}} \right]$$

Dimana:

- KPP** = Komponen Pertumbuhan Proporsional
 $X_{j(t1)}$ = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa-Bali sektor i pada periode akhir (2019)
 $X_{j(t0)}$ = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa-Bali sektor i pada periode awal (2010)
 X_{t1} = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa dan Bali pada periode akhir (2019)
 X_{t0} = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa dan Bali pada periode awal (2010)

$KPP < 0$ = Menunjukkan bahwa sector i pada provinsi j pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama se Jawa-Bali

$KPP > 0$ = Menunjukkan bahwa sector i pada provinsi j pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama se Jawa-Bali

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah/KPPW

KPPW (biasa disebut dengan *different shift*) mengukur daya saing suatu sektor di suatu provinsi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di provinsi lain. KPPW terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, maupun infrastruktur ekonomi. Penghitungan KPPW menggunakan formula sebagai berikut:

$$KPPW = \left[\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{j(t1)}}{X_{j(t0)}} \right]$$

Dimana:

- KPPW** = Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
 $X_{ij(t1)}$ = PDRB sektor i di provinsi j pada periode akhir (2019)
 $X_{ij(t0)}$ = PDRB sektor i di provinsi j pada periode awal (2010)
 $X_{j(t1)}$ = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa-Bali sektor i pada periode akhir (2019)
 $X_{j(t0)}$ = Total PDRB 7 Provinsi di Jawa-Bali sektor i pada periode awal (2010)

$KPPW < 0$ berarti sector i di provinsi j relatif tidak mempunyai daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama se Jawa-Bali

$KPPW > 0$ berarti sector i di provinsi j mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama se Jawa-Bali

d. Menghitung Pergeseran Bersih (PB)

Apabila komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah dijumlahkan maka akan diperoleh pergeseran bersih (PB) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu sektor perekonomian. Perubahan bersih pada sektor i pada provinsi j dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PB_{ij} = KPP_{ij} + KPW_{ij}$$

Dimana:

PB_{ij} = Pergeseran bersih sektor i di provinsi j

KPP_{ij} = Komponen Pertumbuhan Proporsional sektor i di provinsi j

KPW_{ij} = Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah sektor i pada provinsi j

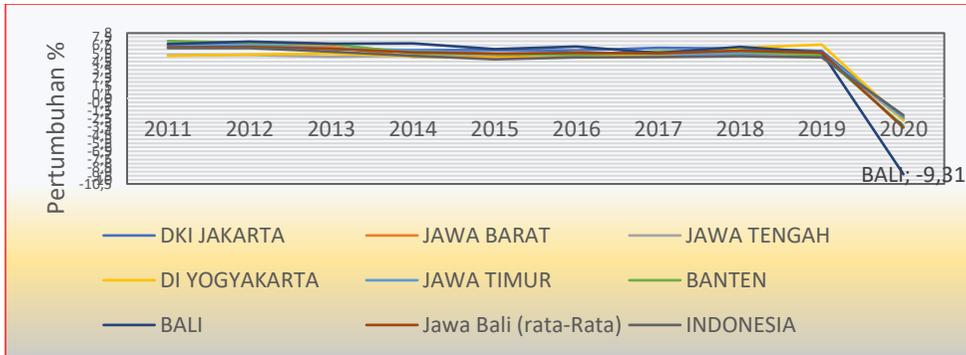
$PB_{ij} < 0$ berarti pertumbuhan sektor i di provinsi j mundur (tumbuh negatif)

- $PB_{ij} > 0$ berarti pertumbuhan sektor i di provinsi j tumbuh yang progresif (maju)

VII. Analisis dan Temuan

1. Perekonomian Jawa dan Bali

Perekonomian Jawa-Bali dalam kurun waktu 2011-2019 tumbuh rata-rata sebesar 5,81%, lebih besar dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,37% untuk kurun waktu yang sama. Namun, pada tahun 2020 akibat pandemic covid 19, pertumbuhan ekonomi Jawa Bali berkontraksi sebesar 3,60% berkontraksi lebih besar dibanding perekonomian nasional yang berkontraksi sebesar 2,07%. Gambar 2 berikut memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Jawa Bali dalam kurun waktu 2011-2020. Tahun 2020, diantara 7 Provinsi di Jawa dan Bali, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berkontraksi paling dalam sebesar 9,31%, disusul Provinsi Banten yang berkontraksi sebesar 3,38%. Sementara itu, 5 provinsi lain di Jawa dan Bali berkontraksi pada kisaran 2,4 – 2,7%. Penurunan perekonomian Bali disebabkan oleh ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor Pariwisata, sehingga ketika sektor ini terkena imbas akibat pademik Covid-19, maka perekonomian berkontraksi cukup dalam. Data memperlihatkan bahwa devisa pariwisata di Provinsi Bali tahun 2020 menurun cukup tajam, dari 7.192 Milyar USD tahun 2019 turun menjadi hanya 1.226 Milyar USD tahun 2020. Sementara, kalau dilihat dari jumlah kunjungan wisman, tahun 2019 sebanyak 6.272 orang turun menjadi 1.069 orang pada tahun 2020. Fenomena ini cukup menarik untuk dianalisis khususnya dari segi struktur perekonomian di wilayah Jawa-Bali.



Gambar 2. Tren Pertumbuhan Ekonomi 7 Provinsi di Jawa dan Bali 2011-2020

Sumber: Diolah dari BPS

2. Hasil Analisis LQ dan Pembahasan

Hasil analisis LQ perekonomian Jawa Bali tahun 2010 dan 2019 terlihat dalam Tabel 1 dan Table 2 berikut:

| PROVINSI | Sektor | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DKI JAKARTA | 0.01 | 0.10 | 0.48 | 0.68 | 0.59 | 1.40 | 1.07 | 0.80 | 1.18 | 1.57 | 2.27 | 1.98 | 3.04 | 1.48 | 1.56 | 1.62 | 1.54 |
| JAWA BARAT | 1.09 | 1.28 | 1.51 | 1.31 | 0.90 | 0.69 | 0.98 | 1.19 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.83 |
| JAWA TENGAH | 1.77 | 0.82 | 1.17 | 0.23 | 1.01 | 1.03 | 0.93 | 0.86 | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 0.49 | 0.13 | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.78 |
| DI YOGYAKARTA | 1.24 | 0.24 | 0.48 | 0.33 | 1.36 | 0.95 | 0.50 | 1.63 | 2.09 | 1.99 | 0.69 | 1.99 | 0.50 | 2.12 | 2.55 | 2.52 | 1.33 |
| JAWA TIMUR | 1.49 | 2.10 | 1.00 | 1.01 | 1.26 | 0.90 | 1.12 | 0.79 | 1.12 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.77 | 0.76 | 0.58 | 0.78 |
| BANTEN | 0.68 | 0.37 | 1.35 | 3.32 | 1.22 | 0.80 | 0.80 | 1.72 | 0.54 | 0.86 | 0.54 | 2.16 | 0.41 | 0.53 | 0.92 | 1.32 | 0.72 |
| BALI | 1.90 | 0.47 | 0.24 | 0.46 | 2.96 | 0.88 | 0.55 | 2.13 | 4.49 | 1.31 | 0.87 | 1.39 | 0.51 | 1.60 | 1.45 | 2.10 | 0.78 |

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran,
7. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyedia Akomodasi & Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis LQ 7 Provinis di Jawa-Bali Tahun 2019

| PROVINSI | Sektor | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DKI JAKARTA | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.98 | 0.55 | 1.18 | 1.90 | 0.91 | 1.07 | 1.63 | 2.22 | 1.78 | 3.02 | 1.40 | 1.28 | 1.48 | 1.65 |
| JAWA BARAT | 1.05 | 0.81 | 1.54 | 1.11 | 1.03 | 0.84 | 0.98 | 1.11 | 0.59 | 0.61 | 0.50 | 0.36 | 0.16 | 0.70 | 0.78 | 0.74 | 0.93 |
| JAWA TENGAH | 1.85 | 1.96 | 1.22 | 0.34 | 0.91 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.14 | 0.92 | 1.09 | 0.78 | 0.74 |
| DI YOGYAKARTA | 1.17 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 1.30 | 1.08 | 0.52 | 1.32 | 2.10 | 1.58 | 0.75 | 2.01 | 0.42 | 2.61 | 2.42 | 2.35 | 1.17 |
| JAWA TIMUR | 1.50 | 2.47 | 1.08 | 0.85 | 1.27 | 0.92 | 1.17 | 0.74 | 1.19 | 0.83 | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.77 | 0.74 | 0.61 | 0.60 |
| BANTEN | 0.80 | 0.31 | 1.21 | 2.92 | 1.26 | 1.00 | 0.86 | 1.60 | 0.54 | 0.84 | 0.59 | 2.49 | 0.38 | 0.65 | 0.85 | 1.11 | 0.66 |
| BALI | 1.97 | 0.43 | 0.23 | 0.64 | 2.73 | 0.99 | 0.59 | 1.83 | 4.34 | 1.01 | 0.85 | 1.29 | 0.40 | 2.01 | 1.53 | 2.14 | 0.71 |

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran,
7. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyedia Akomodasi & Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Hasil perhitungan LQ terhadap perekonomian Jawa-Bali pada tahun 2010 dan 2019 secara umum tidak banyak mengalami perubahan struktur ekonomi. Sektor-sektor yang menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2010 di masing-masing provinsi di Jawa-Bali pada umumnya tidak mengalami perubahan. Table 3 berikut memperlihatkan hasil pemetaan perubahan struktur ekonomi di 7 provinsi Jawa-Bali:

Table 3. Hasil Pemetaan Perubahan Struktur Ekonomi di 7 Provinsi Jawa-Bali

| Provinsi | Struktur Ekonomi Berdasarkan LQ Tahun 2019 | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sektor dengan LQ > 1 (Komoditas menjadi basis atau sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah) | Sektor dengan LQ = 1 (Komoditas tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor) | Sektor dengan LQ < 1 (Komoditas termasuk non-basis, produksi komoditas tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar) |
| DKI JAKARTA | <ul style="list-style-type: none"> • KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran Penyedia Akomodasi & Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia • Jasa Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan |
| JAWA BARAT | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan | | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyedia Akomodasi & Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>JAWA TENGAH</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran • Jasa Pendidikan | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Penyedia Akomodasi & Makan MinumInformasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya |
| <p>DI YOGYAKARTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulan • KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran • Transportasi dan Pergudangan • Penyedia Akomodasi & Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Real Estat • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya | | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan |
| <p>JAWA TIMUR</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulan • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyedia Akomodasi & Makan Minum | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik dan Gas • KontruksiPerdagangan Besar dan Eceran • Transportasi dan Pergudangan • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan |

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya |
| BANTEN | <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan • Real Estat • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyedia Akomodasi & Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya |
| BALI | <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan • Penyedia Akomodasi & Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Real Estat • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, • Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan • Jasa Lainnya |

Sementara itu, ada beberapa sektor yang mengalami transformasi dari tahun 2010 ke tahun 2019 baik transformasi dari sektor basis menjadi sektor non-basis maupun sebaliknya dari sektor non basis menjadi sektor basis dan subsistem. Tabel 4 berikut merangkum sektor yang mengalami transformasi.

Table 4. Sektor yang Mengalami Transformasi dari Tahun 2010 ke Tahun 2019

| | Sektor yang mengalami Transformasi dari Non-Basis Menjadi Basis | Sektor yang mengalami Transformasi dari Non-Basis Menjadi Subsistem/sebaliknya | Sektor yang Mengalami Transformasi dari Basis menjadi Non basis |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DKI JAKARTA | | Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dari Basis Menjadi Non-Basis/Subsistem) | |
| JAWA BARAT | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan | | Pertambangan dan Penggalian |
| JAWA TENGAH | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Jasa Pendidikan | | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang |
| DI YOGYAKARTA | Perdagangan Besar dan Eceran, | | |
| JAWA TIMUR | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik dan Gas • Informasi dan Komunikasi |
| BANTEN | | Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran (dari non basis menjadi subsistem) | |
| BALI | - | -- | - |

Pembahasan

Hasil temuan mengidentifikasi bahwa secara umum perekonomian Jawa-Bali pada tahun 2010 dan 2019 tidak banyak mengalami pergeseran struktur ekonomi. Sektor-sektor yang menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2010 di masing-masing provinsi di Jawa-Bali pada umumnya tidak mengalami perubahan. Hanya beberapa sektor yang mengalami perubahan yaitu:

- Sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi DKI pada tahun 2010 masih menjadi sektor basis, namun pada tahun 2019 berubah menjadi sektor non-basis, meskipun secara koefisien nilai $LQ = 1$ yang berarti komoditas tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Untuk itu, ke depan sebaiknya Pemprov DKI memperhatikan kebijakan yang dapat mendorong sektor ini menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diekspor ke luar.
- Provinsi Jawa Barat mampu mentransformasi sektor (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan sektor (b) Transportasi dan Pergudangan, dari yang sebelumnya sektor non basis (2010) menjadi sektor basis pada tahun 2019. Dengan demikian, kedua sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah perekonomian yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi. Namun, dalam kurun waktu 2010 ke 2019, Provinsi Jabar juga mengalami penurunan peran pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2010, sektor ini masih menjadi sektor basis karena nilai LQ nya masih > 1 (1,28) dan turun menjadi 0,81 pada tahun 2019. Dengan demikian, provinsi Jabar memerlukan impor untuk mencukupi kebutuhan sektor pertambangan dan penggalian. Pemprov Jabar perlu mensinergikan dengan kebijakan pemerintah Pusat

- agar ke depan sektor ini berkembang dan mampu Kembali menjadi sektor unggulan di Jawa Barat.
- c. Provinsi Jawa Tengah juga mampu mentransformasi dua sektor, yaitu (a) Pertambangan dan Penggalian, dan sektor (b) Jasa Pendidikan, dari yang sebelumnya sektor non basis (2010) menjadi sektor basis pada tahun 2019. Dengan demikian, di tahun 2019 kedua sektor ini dapat memiliki keunggulan komparatif, dan sumber pertumbuhan, serta hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah perekonomian yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi. Namun, dalam kurun waktu 2010 ke 2019, Provinsi Jateng juga mengalami penurunan peran pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pada tahun 2010, sektor ini masih menjadi sektor basis karena nilai LQ nya masih > 1 (1,01) dan turun menjadi 0,91 pada tahun 2019. Dengan demikian, provinsi Jateng memerlukan impor untuk mencukupi kebutuhan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Ke depan Pemprov Jateng perlu terus mengupayakan sinergi dengan kebijakan pemerintah Pusat sehingga sektor-sektor yang bersifat basis akan terus menjadi sumber pertumbuhan dan sektor-sektor yang non basis dapat ditransform menjadi sektor basis.
 - d. Provinsi DIY mampu mentransformasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dari yang sebelumnya sektor non basis (2010) menjadi sektor basis pada tahun 2019. Dengan demikian, kedua sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan dan memiliki keunggulan komparatif. Disamping mempertahankan sektor-sektor yang sudah menjadi basis pertumbuhan, DIY perlu terus mengupayakan peningkatan kualitas kebijakan dan fokus pada sektor yang bersifat non basis (ada 6 sektor) sehingga sektor-sektor tersebut semakin berdaya saing dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
 - e. Jawa Timur mengalami perubahan yang bersifat penurunan pada dua sektor yaitu: (a) Pengadaan Listrik dan Gas, dan (b) Informasi dan Komunikasi. Kedua sektor ini masih menjadi sektor basis pada tahun 2010, namun berubah menjadi sektor non basis pada tahun 2019. Dengan demikian, untuk mencukupi kebutuhan permintaan domestic, Jawa Timur perlu mengimpor kedua sektor tersebut dari luar. Sinergi kebijakan di kedua sektor tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat diperlukan akan kedua sektor tersebut dan sektor lain yang masih menjadi sektor basis dan semakin memberikan peran yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Jatim.
 - f. Provinsi Banten tidak banyak mengalami perubahan dalam struktur ekonomi, hanya terjadi perubahan pada sektor Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dari yang sebelumnya sektor non-basis memerlukan impor dari luar menjadi sektor non-basis namun cukup untuk memenuhi kebutuhan domestic. Banten diharapkan fokus pada sektor basis agar sektor tersebut mampu menjadi semakin kompetitif, dan berupaya mendorong sektor-sektor non basis agar mampu tumbuh menjadi sektor basis dan memberikan kontribusi yang semakin tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - g. Provinsi Bali tidak terjadi perubahan struktur ekonomi dari tahun 2010 ke tahun 2019. Bali diharapkan fokus pada sektor basis agar sektor tersebut mampu secara yterus menerus sebagai sumber pertumbuhan dan berupaya mendorong sektor-sektor non basis (8 sektor) agar mampu tumbuh menjadi sektor basis yang lebih kompetitif.

3. Hasil analisis *Shift Share* dan Pembahasan.

Sesuai dinamika pengelolaan pembangunan dari tahun ke tahun, sebuah sektor ekonomi bisa menjadi kurang penting peranannya dalam pembentukan PDB/PDRB digeser oleh sektor lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Untuk mengetahui pergeseran sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah dapat dianalisis dengan metode shift share. Hasil analisis terhadap perhitungan (*Sift Share Analysis*) 7 provinsi di wilayah Jawa-Bali terlihat pada table-tabel berikut:

a. Komponen Pertumbuhan Jawa-Bali (KPJB)

Hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai KPJB sebesar 0,66 yang berarti ekonomi (PDRB) Jawa-Bali dalam kurun waktu 2010 sd 2019 tumbuh sebesar 66% (PDRB atas harga konstan 2010).

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)

KPP (*proportionally shift*) merupakan alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan produksi nasional (dalam hal ini Jawa-Bali) karena tingginya konsentrasi industri (sektor) regional. Hasil perhitungan KPP di wilayah Jawa-Bali 2010 – 2019 terlihat dalam Table 5 berikut:

Tabel 5: KPP di wilayah Jawa-Bali 2010 – 2019

| NO. | SEKTOR | KPP |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0.43 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -0.34 |
| 3 | Industri Pengolahan | -0.08 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | -0.46 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -0.20 |
| 6 | Konstruksi | 0.01 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.01 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0.25 |
| 9 | Penyedia Akomodasi & Makan Minum | 0.16 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0.78 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.13 |
| 12 | Real Estat | 0.03 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0.41 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0.35 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0.16 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.32 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0.30 |

Hasil perhitungan KPP memperlihatkan bahwa terdapat 6 sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan PDRB se Jawa-Bali. Sementara itu, 11 sektor lainnya masing-masing memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan PDRB se Jawa-Bali pada kurun waktu 2010-2019. Implikasi dari temuan ini adalah kebijakan pembangunan wilayah Jawa-Bali perlu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) ke 6 sektor yang tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan PDRB se wilayah Jawa-Bali.

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah/KPPW

KPPW (*differential shift*) mengukur daya saing suatu sektor di suatu provinsi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di provinsi lain. KPPW terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, maupun infrastruktur ekonomi. Hasil perhitungan KPPW terlihat dalam Table 6.

Tabel 6. KPPW 7 Provinsi di Wilayah Jawa-Bali 2010 – 201

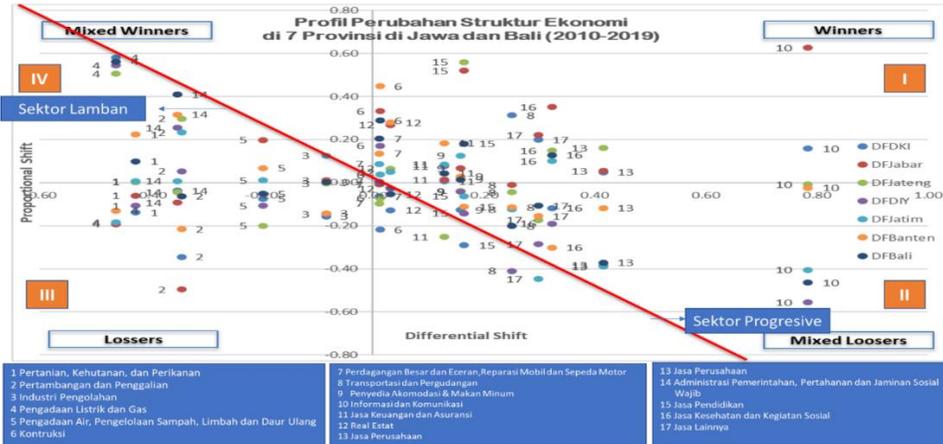
| Sektor | KPPW/Differential Shift | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| | DSD KI | DSJa bar | DSJat eng | DSD IY | DSJa tim | DSBanten | DSBali |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0.14 | -0.06 | 0.00 | -0.11 | 0.01 | 0.22 | 0.10 |
| Pertambangan dan Penggalian | -0.34 | -0.50 | 0.30 | 0.05 | 0.23 | -0.22 | -0.06 |
| Industri Pengolahan | -0.16 | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.13 | -0.14 | 0.00 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0.58 | -0.19 | 0.50 | 0.54 | -0.19 | -0.13 | 0.56 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -0.07 | 0.20 | -0.20 | -0.11 | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
| Konstruksi | -0.22 | 0.33 | -0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.45 | 0.29 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -0.06 | -0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| Transportasi dan Pergudangan | 0.31 | -0.01 | -0.04 | -0.41 | -0.12 | -0.11 | -0.20 |
| Penyedia Akomodasi & Makan Minum | -0.13 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| Informasi dan Komunikasi | 0.16 | 0.63 | -0.01 | -0.56 | -0.41 | -0.02 | -0.46 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.01 | 0.01 | -0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.04 |
| Real Estat | -0.13 | 0.27 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0.28 | -0.05 |
| Jasa Perusahaan | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.38 | -0.39 | -0.12 | -0.37 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0.04 | -0.09 | -0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.32 | 0.41 |
| Jasa Pendidikan | -0.29 | 0.52 | 0.56 | -0.14 | -0.06 | -0.11 | 0.18 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | -0.12 | 0.35 | 0.15 | -0.19 | 0.10 | -0.30 | 0.13 |
| Jasa Lainnya | 0.20 | 0.22 | -0.17 | -0.29 | -0.45 | -0.15 | -0.11 |

Dari perspektif perekonomian Jawa-Bali, hasil perhitungan KPPW memperlihatkan bahwa sektor-sektor di Provinsi Jabar dan Jatim mempunyai daya saing yang cukup baik (ada 11 sektor) disusul Bali (10 sektor), Banten (8 sektor), Jateng (7 sektor), DKI dan DIY masing-masing 6 sektor yang memiliki daya saing cukup baik. Definisi daya saing disini dimaknai sebagai daya saing masing-masing sektor di masing-masing provinsi terhadap daya saing total sektor yang sama se Jawa-Bali). Sektor industri pengolahan hanya kompetitif di 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Jatim. Sedangkan sektor industri pengolahan di Bali mempunyai daya saing yang sama dengan daya saing sektor tersebut secara keseluruhan (se wilayah Jawa Bali). Daya saing yang baik sektor Informasi dan komunikasi hanya dimiliki oleh 2 provinsi yaitu DKI dan Jabar. Daya saing yang baik untuk sektor transportasi dan pergudangan hanya dimiliki oleh provinsi Jabar. Implikasi dari hasil temuan ini adalah kesiapan provinsi-provinsi di wilayah Jawa-Bali dalam untuk melakukan transformasi ke sektor yang berbasis teknologi (industri pengolahan, informasi dan komunikasi) masih sangat rendah. Hampir semua provinsi mempunyai daya saing yang baik di bidang jasa keuangan dan asuransi (6 dari 7 provinsi yang diteliti). Hal ini memperkuat argumen bahwa sebagian besar wilayah di Jawa-Bali sedang menuju proses deindustrialiasi. Tingginya perkembangan kontribusi sektor tersier (jasa-jasa) terhadap PRDB Jawa-Bali diatas sektor sekunder (manufaktur, listrik, gas dan bangunan), diduga sektor jasa didominasi oleh sektor informal. Ini juga menunjukkan gejala terjadinya premature deindustrialisasi. Efek perlambatan industri manufaktur, yang pertama adalah penurunan penerimaan pajak, karena industri pengolahan menyumbang 30% penerimaan pajak. Kedua, dengan deindustrialisasi prematur, potensi penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan menurun dan meningkatkan risiko pengangguran.

d. Profil Perubahan Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Apabila hasil perhitungan shift share dipetakan dalam bentuk gafiik kuadran maka nampak posisi perubahan struktur ekonomi di 7 provinsi di wilayah Jawa-Bali sebagaimana Gambar 3 dibawah. Seperti terlihat dalam Gambar 3 bahwa sektor Industri pengolahan di Sebagian besar provinsi, posisinya berada di kuadran III yang berarti tumbuh lamban dan komoditasnya kurang mempunyai daya saing. Sementara, Industri komunikasi dan Informasi (10) sebagian besar berada pada kuadran II yang berarti sektor ini tumbuh secara progresif namun kurang mempunyai daya saing.



Gambar 3: Hasil Analisis Shift Share Profile Perubahan Struktur Ekonomi 7 Provibsi di Wilayah Jawa-Bali 2020-2019

Begitu halnya dengan sektor transportasi dan pergudangan (8), di sebagian besar provinsi sebenarnya sektor ini tumbuh secara progresif, namun sektor transportasi dan pergudangan nampaknya kurang mempunyai daya saing yang baik (kuadran II). Sektor-sektor jasa (15, 16, 17) di sebagian besar provinsi telah tumbuh progresif dan mempunyai daya saing yang baik (kuadran I). Implikasi dari temuan ini adalah adanya gejala terjadinya premature deindustrialisasi. Deindustrialisasi yang premature di Jawa-Bali, berpotensi dalam penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan dan meningkatkan risiko pengangguran. Meskipun sektor jasa tumbuh progresif dan berdaya saing, namun, bila diperhatikan dari sisi produktivitas tenaga kerja, nampak bahwa produktivitas tenaga kerja sektor jasa ini jauh lebih kecil dibanding produktivitas tenaga kerja sector industri pengolahan (Haryanto, 2020). Ini berimplikasi bahwa sektor jasa banyak menyerap tenaga kerja yang dengan kualitas rendah dan diperkirakan akan cukup rentan terhadap dampak krisis.

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kesimpulan

Hasil analisis LQ 7 provinsi di Jawa-Bali menunjukkan secara umum perekonomian Jawa-Bali pada tahun 2010 dan 2019 tidak banyak mengalami pergeseran struktur ekonomi. Sektor-sektor yang menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2010 di masing-masing provinsi di Jawa-Bali pada umumnya masih tetap menjadi sektor bais/sumnber pertumbuhan di tahun 2019. Beberapa sektor yang mengalami perubahan antara lain: Sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi DKI berubah menjadi sektor non-basis tahun 2019, sektor (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan sektor (b) Transportasi dan Pergudangan, dari yang sebelumnya sektor non basis (2010) di Jabar berubah menjadi sektor basis pada tahun 2019. Namun, sektor Pertambangan dan Penggalian, berubah menjadi sektor non-basis. Provinsi Jawa Tengah mampu mentransform dua sektor menjadi sektor basis tahun 2019, yaitu (a) Pertambangan dan Penggalian, dan sektor (b) Jasa Pendidikan, dari yang sebelumnya sektor non basis

(2010) menjadi sektor basis pada tahun 2019, namun satu sektor menurun menjadi non basis yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Provinsi DIY mampu mentransform sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke sektor Basis tahun 2019. Jawa Timur mengalami perubahan yang bersifat penurunan pada dua sektor yaitu: (a) Pengadaan Listrik dan Gas, dan (b) Informasi dan Komunikasi. Provinsi Banten tidak banyak mengalami perubahan dalam struktur ekonomi, hanya terjadi perubahan pada sektor Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dari yang sebelumnya sektor non-basis memerlukan impor dari luar menjadi sektor non-basis namun cukup untuk memenuhi kebutuhan domestic.

Hasil analisis shift share memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan (3) di sebagian besar provinsi, posisinya berada di kuadran III yang berarti tumbuh lambat dan komoditasnya kurang mempunyai daya saing. Sementara itu, sektor industri komunikasi dan Informasi (10) sebagian besar berada pada kuadran II yang berarti sektor ini tumbuh secara progresif namun kurang mempunyai daya saing. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan (8), di sebagian besar provinsi sektor ini mampu tumbuh secara progresif, namun sektor ini kurang mempunyai daya saing yang baik (kuadran II). Disisi lain, sektor-sektor jasa (15, 16, 17) di sebagian besar provinsi telah tumbuh progresif dan mempunyai daya saing yang baik (kuadran I). Implikasi dari temuan ini adalah adanya gejala terjadinya premature deindustrialisasi. Deindustrialisasi yang premature di Jawa-Bali, berpotensi dalam penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan dan meningkatkan risiko pengangguran. Meskipun sektor jasa tumbuh progresif dan berdaya saing; namun, bila diperhatikan dari sisi produktivitas tenaga kerja, nampak bahwa produktivitas tenaga kerja sektor jasa ini jauh lebih kecil dibanding produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan (Haryanto, 2020). Ini berimplikasi bahwa sektor jasa banyak menyerap tenaga kerja dengan kualitas rendah dan produktifitas yang diperkirakan cukup rentan terhadap dampak krisis.

2. Rekomendasi Kebijakan

- a. Peran strategis sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi, bukan tanpa alasan, karena sektor industri akan membawa dampak turunan, yakni meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Sementara, sektor industri pengolahan se provinsi Jawa-Bali dalam krurun waktu 2010-2019 memiliki pertumbuhan yang kurang progresif dan daya saing yang kurang baik. Untuk itu, dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi Jawa-Bali harus secara serempak diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam secara masif di seluruh sentra produksi seperti pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian dan lainnya. Industri pengolahan harus mampu memberi nilai tambah (*value added*) pada produk-produk sektor primer. Sejalan dengan itu, hilirisasi subsektor industri manufaktur yang memiliki keterkaitan kuat ke depan patut dijadikan prioritas. *Lesson learn* dari sukses transformasi ekonomi pada beberapa negara maju, membuktikan peranan sektor industri yang lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonominya.

- b. Reformulasi kebijakan pembangunan wilayah Jawa-Bali dengan mengarus-utamakan transformasi struktur sektor industri pengolahan, informasi dan teknologi sebagai pilar utama pembangunan. Mainstreaming pembangunan di bidang jasa, seperti sektor pariwisata cenderung mendorong efek berkembangnya jasa-jasa yang bersifat informal dan dapat memperdalam fenomena premature deindustrialisasi yang dapat menyebabkan kerentanan stabilitas makroekonomi, mengingat sektor manufaktur dalam negeri belum mature/mapan.
- c. Sektor informasi dan teknologi di sebagian besar provinsi di wilayah Jawa-Bali mempunyai pertumbuhan yang sangat progresif, namun kurang didukung dengan daya saing yang baik pada sektor ini, Hal ini nampak pada posisi pemetaan hasil analisis Shift Share yang sebagian besar berada pada Kuadran II. Untuk itu, pengembangan kapasitas SDM yang terstruktur dan sistematis, berbasis pada Inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi perlu mendapatkan prioritas tinggi. Disamping itu, penguatan lembaga-lembaga riset yang berbasis pada inovasi sektor industri, berdampak signifikan pada sektor produksi, dan mampu memberikan peningkatan nilai tambah (added value), perlu dilakukan oleh pemerintah, sehingga hasil riset terkoneksi langsung dengan kebijakan transformasi struktural.
- d. Pengembangan Pusat-Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi di Kawasan-Kawasan Ekonomi/Industri Khusus di wilayah Jawa-Bali sebagai pusat-pusat inovasi, riset pengembangan produk, inkubasi bisnis, alih teknologi, sertifikasi, mediasi dan promosi untuk mendukung daya saing sektor industri manufaktur, informasi dan teknologi.
- e. Transformasi ekonomi sektor industri, dan pengembangan sektor informasi dan teknologi di wilayah Jawa-Bali tidak akan berhasil tanpa didukung iklim investasi yang kondusif. Sementara, fakta menunjukkan bahwa investasi asing cenderung tersendat masuk ke sektor riil, karena begitu banyaknya hambatan-hambatan yang belum bisa teratasi sampai saat ini, mulai dari perizinan (regulasi), infrastruktur, birokrasi, pengadaan lahan, kondisi ketenagakerjaan, dangkal dan rigidnya sektor keuangan, dan sebagainya. Belum teratasinya hambatan-hambatan tersebut tercermin dari posisi daya saing ekonomi Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga, Untuk itu, Indonesia harus secara konsisten dan terpola (dalam mengawal implementasi Omnibus Law) sebagai langkah dalam melakukan reformasi dibidang kelembagaan/regulasi, investasi, birokrasi, ketenagakerjaan, infrastruktur, pertanahan dan sektor keuangan.
- f. Perlu kajian lebih lanjut dengan mempertajam sub analisis pada level sub sektor atau komoditas, agar rekomendasi kebijakan lebih terfokus dan lebih operasional.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

- BPS Provinsi Banten, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://banten.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- BPS Provinsi DIY, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- BPS Provinsi Jabar, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://jabar.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- BPS Provinsi DKI, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://jakarta.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- BPS Provinsi Jatim, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://jatim.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- BPS Provinsi Jateng, (2021) Statistik Ekonomi dan Perdagangan. Available at: <https://jateng.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab5>
- Glasson. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. LPFE UI. Jakarta.
- Goschin, Z. 2014. Regional growth in Romania after its accession to EU: a Shift-Share analysis approach. *Procedia economic and finance*. Available online in www.sciencedirect.com. p. 169-175.
- Haryanto (2020), Transformasi Struktural di Indonesia: Kerangka Konseptual, Teori, Tren, dan Temuan Empiris, Makalah Kebijakan.
- Hood, Ron. 1998. *Economic Analysis: A Location Quotient*. Primer. Principal Sun Region Associates, Inc
- Miller. M.1991. Location Quotient Basic Tool for Economic Development Analysis. *Economic Development Review*, 9(2);65.
- Perloff, H. S. et al., *Regions, Resources and Economic Growth* (Johns Hopkins, 1960).
- Rice, P. F and J. H. Marshall. 2010. Analysis Of Recent Changes In Arkansas Personal Income: 2007 – 2009: A Shift-Share Approach. *Journal Of Business Administration Online* 9(2): 1-12.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis Shift-share : Perkembangan dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, volume 8 nomor 1. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UGM
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara: Jakarta